



Ananda Zega¹
 Anugerah Tatema
 Harefa²

UPAYA KPU KABUPATEN NIAS UTARA MENCEGAH KEKERASAN SIMBOLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2019

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019, Mengapa kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi, dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun tujuan penggunaan pendekatan deskriptif adalah mencari makna yang berawal dari fakta dengan melakukan observasi mencatat semua fakta secara holistik bersifat ilmiah dengan masalah yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam semua pembicaraan, hasil gambar sebagai bukti nyata, dan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat percakapan dengan sumber data atau informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: Pertama, bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu adanya isu money politik/suap, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah dimedia sosial. Kedua kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi karena, faktor rendahnya pendidikan politik khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan Pemilihan, faktor adanya iming-imingan sejumlah uang dari Pasangan calon Kepala Daerah melalui perantara dari TS (tim sukses) dari Paslon sehingga, masyarakat pun tergiur dan terpengaruh dengan besarnya jumlah nominal uang yang di berikan Paslon demi mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat. Ketiga bagaimana upaya KPU dalam mengatasi kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemilihan yang jujur dan berkualitas.

Kata kunci: KPU, Kekerasan Simbolik, Pilkada

Abstrack

This study aims to find out what are the forms of symbolic violence in the implementation of the 2019 North Nias Regency Regional Head Election, why symbolic violence in the 2019 North Nias Regency Regional Head Election can occur, and to find out how the efforts made by the North Nias Regency KPU in preventing symbolic violence that occurred in the 2019 North Nias Regency Regional Head Election. This research uses a descriptive approach with qualitative methods. The purpose of using a descriptive approach is to find meaning that starts from facts by making observations, recording all facts holistically, scientifically with the

^{1,2}Prodi PPKn, FKIP, Universitas Nias
 e-mail:anandazegappkn@gmail.com

problems observed. The research instrument used in this study is the researcher himself using a mobile phone as a tool to record all conversations, image results as real evidence, and a useful notebook to log conversations with data sources or informants. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research and discussion concluded that: First, symbolic violence that occurred at the 2019 Regional Head Election in North Nias Regency was the issue of political money / bribery, the existence of news hoaxes about the spouses of Regional Head candidates on social media. Second, symbolic violence in the holding of the Kabup Regional Head Election can occur because, the factor of low political education, especially for people who have limitations in carrying out elections, the factor of the lure of some money from the spouse of the Regional Head candidate through the intermediary of the TS (success team) from Paslon so that, the community is tempted and influenced by the large nominal amount of money given by Paslon in order to get the most votes from the community. Third, how is the KPU effort in overcoming symbolic violence in Penyele.

Keywords: KPU, Symbolic Violence, Pilkada

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni ‘*Polis*’ artinya negara kota. Kemudian, dibedakan menjadi beragam kata dan definisi, seperti kata *polities* artinya warga negara, *Politikos* artinya kewarganegaraan, *politike tehne* artinya kemahiran politik, dan *politike episteme* artinya ilmu politik. Dari pandangan para ahli tentang politik adalah beragam aktivitas dalam suatu sistem Politik yang berhubungan dengan proses penentuan dan pelaksanaan tujuan dari suatu sistem tersebut dalam suatu negara. Menurut pandangan Ramlan politik adalah korelasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat untuk tujuan kebaikan masyarakat suatu Negara (Budiardjo, 1982:8).

Politik merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public pemerintah. Politik juga dapat diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles, 2016:15). Dalam bidang politik mencakup banyak hal, mulai dari merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan segala kegiatan, mengamati serta menganalisa segala pelaksanaan kegiatan dibidang, sistem dan implementasinya. Bidang politik juga termasuk dalam kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pemilihan pilpres dan juga pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pintu yang membuka ruang demokrasi di Indonesia (Feralys, 2015:46). Dengan demikian, definisi politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam suatu negara demi tujuan bersama (Surbakti, 1992:1-8).

Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing dan ketika mendengar kata “kekerasan”, sebagian besar hal tersebut akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan. Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar. Suatu konsep yang sedang menjadi fokus perhatian di berbagai forum diskusi. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga pendidikan. Kekerasan juga banyak dilakukan atau diambil sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, konflik Pilkada, sidang di DPR, kegiatan orientasi siswa atau mahasiswa yang diadakan di awal tahun akademik, menegakkan disiplin di sekolah atau institusi lain banyak menggunakan kekerasan. Kasus kekerasan yang cukup serius salah satunya adalah kasus kekerasan simbolik dalam dunia politik. Kekerasan bukanlah sebuah fenomena tanpa sebab sebagaimana fenomena-fenomena yang lain (Martono, 2012:1-2).

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perseorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Reza, 2012:19).

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Pramesti 2017:625). Kekerasan adalah

serangkaian tindakan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong melukai orang lain tanpa sadar, kekerasan emosional atau psikologi seperti ancaman, mempermalukan orang lain, berbicara buruk kepada orang lain dan lain sebagainya (Santoso, 2002:38). Kekerasan dapat diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Ainun, 2012:2). Jadi, kekerasan memiliki makna yaitu suatu tindakan yang menyakiti secara psikis, fisik, dan sosial. Dengan demikian, kekerasan adalah suatu tindakan yang terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain dengan cara memukul, menendang, membunuh, untuk menyakiti tubuh korban (Matlin, 2008:9).

Uraian mengenai fenomena kekerasan yang telah banyak dikenal masyarakat dan telah sering menjadi pusat perhatian sebagian besar masyarakat. Kekerasan fisik serta kekerasan psikologis hanyalah bentuk kekerasan yang wujudnya “mudah dikenali” dan dampaknya juga mudah untuk diamati. Namun, banyak pihak yang tidak menyadari akan adanya bentuk kekerasan lain yang hampir selalu terjadi di sekolah, keluarga maupun politik (Darmidi, 2010:35-36). Bentuk kekerasan tersebut adalah “kekerasan simbolik.” Bentuk kekerasan ini hampir tidak pernah menjadi pokok perhatian berbagai pihak, padahal jika diamati, bentuk kekerasan inilah yang memberikan dampak yang cukup besar, terutama dampak bagi masyarakat secara makro (Hoetomo, 2012:4-5).

Kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang dapat dikenali dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Artinya, kekuasaan (baik dari segi ekonomi, politik, budaya atau lainnya) yang memiliki kemampuan untuk tidak dapat dikenali bentuk aslinya, kekerasannya, atau kesewenang-wenangannya (Bourdieu, 2021:5).

Kekerasan simbolik merupakan istilah yang dikenal dalam pemikiran Pierre Bourdieu, yakni mengacu pada dipergunakannya kekuasaan atas simbol-simbol untuk melakukan kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini dipahami bukan dalam arti kekerasan fisik radikal, misalnya gerakan agresif, memukul, perang terbuka, atau sejenisnya, tetapi lebih bersifat persuasif. Kekerasan simbolik bersifat mendominasi secara halus, bahkan tidak dirasakan sebagai “kekerasan”, karena sudah menjadi *habitus* suatu masyarakat (Bourdieu, 2021:10). Kekerasan simbolik juga dapat diartikan, sebagai suatu tindakan yang memanfaatkan berbagai sarana media untuk menyakiti hati dan merugikan orang lain. Akibat dari kekerasan simbolik tersebut, memang sebenarnya kalau dikaji tidak langsung mengenai fisik dari korban. Namun sangat menyakiti hati dan berlangsung sangat lama. Kekerasan simbolik sebenarnya jauh lebih kuat dari pada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik melekat dalam setiap tindakan, struktur pengetahuan, struktur kesadaran individual, serta memaksakan kekuasaan pada tatanan sosial (Megan, 2018:23).

Jadi, kekerasan simbolik dapat dimaknai sebagai suatu praktik kekerasan yang aksinya mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaannya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kekerasan simbolik adalah suatu kekerasan yang lebih menunjuk pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak bisa disadari, dan juga tidak bisa dirasakan baik oleh pelaku maupun korbannya. Kekerasan semacam ini, tersebar dimana-mana termasuk dalam keluarga, seperti antara orang tua dan anak. Kekerasan simbolik ini juga tidak hanya ada didalam keluarga saja akan tetapi, terdapat dalam berbagai bidang salah satunya yaitu dalam berpolitikan (Martono, 2012:39).

Selanjutnya berdasarkan pengalaman, dan penglihatan langsung peneliti dilapangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2019 di Kabupaten Nias Utara terdapat beberapa kekerasan simbolik diantaranya yaitu: (1) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias utara selalu dikaitkan dengan isu (money politik) salah satunya dengan memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. (2) dalam pelaksanaan pasangan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara juga terdapat kabar atau berita hoaks tentang calon Kepala Daerah melalui media sosial. Misalnya, *hoax* e-KTP yang dapat memilih dimana saja. *Hoax* e-KTP ini yang menjadi paling berdampak terutama bagi penyelenggara badan Ad Hoc. Yang beredar dimedia sosial seperti Fecebook. (3) mengejantawahkan PNS berada dalam posisi dilematis. PNS

dijadikan sebagai objek kekuatan politik tertentu karena ancaman seperti *nonjob* selalu mengintai mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Fitrah, 2017:36). Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini peneliti hendak menggambarkan Upaya KPU Kabupaten Nias Utara mencegah Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Sedangkan Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang keadaan suatu subjek. Dengan menggunakan pendekatan ini data dapat diperoleh lebih lengkap untuk jawaban atas pertanyaan peneliti. (Nasution, 2015:5). Untuk mengumpulkan data, penelitian ini melibatkan KPU Kabupaten Nias Utara di Kecamatan Lotu, yang jumlahnya berjumlah empat orang Informan, dipilih berdasarkan teknik *purpose sampling*, di mana pemilihan dilakukan berdasarkan kompetensi mereka dan bukan atas dasar representasi atau keterwakilan (Soekanto, 2021:109). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi semi terstruktur (Sugiyono, 2021:317). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan menggunakan analisis data hasil observasi awal atau data sekunder. (Huberman, 2018:15). Model ini memungkinkan peneliti untuk secara efektif mengolah dan memahami data yang dikumpulkan, memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan secara akurat fenomena yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019

Untuk memperoleh data informasi dari responden terkait Upaya KPU Kabupaten Nias Utara mencegah Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain (1) Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019, (2) Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi, (3) Bagaimana upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dimaksud, penulis merangkum hasil wawancara dengan responden atau partisipan penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di KPU Kabupaten Nias Utara bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2019 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Namun, dalam Penyelenggaraannya terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada Pilkada Tahun 2019. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara), yang menyatakan bahwa: Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019 ini ada beberapa kekerasan yang terjadi salah satunya kekerasan simbolik yang ada pada penyelenggaraan Pilkada yaitu: dikaitkan dengan isu money politik dengan memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Pada pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara sering dikaitkan dengan peristiwa politik uang. Setiap Calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang dituju. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Pengetahuan yang tidak menyeluruh ditengah masyarakat, peristiwa politik uang dianggap hal wajar dan cukup lazim, Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaan tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan

tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon pemimpin Daerahnya secara bijak. (Wawancara, Jumat 28 Juli 2023)

Hal Senada juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada memang sudah terjadi di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019. Seperti, money politik/suap, Berita hoaks di media sosial/internet, dan mengejantawahkan PNS dan honorer berada dalam posisi dilematis, setiap pasangan calon Kepala Daerah merencanakan taktiknya untuk mencari dukungan dari pihak manapun termasuk mengaitkan para PNS maupun honorer tersebut. Baik dibidang pendidikan maupun perkantoran, Pasangan calon Kepala Daerah dalam relasi sosialnya mengakui bahwa PNS dan honorer dengan memberikan jaminan pekerjaan yang layak jika mereka dipihak Pasangan calon tersebut. Sebuah keuntungan yang tidak disia-siakan oleh siapa pun PNS dan honorer yang menerima peluang tersebut karena menghendaki posisi aman. Namun, pada celah tertentu tidak disadari bahwa keadaan yang menguntungkan tersebut kenyataannya telah mengenai mereka sebuah kekerasan simbolik yaitu tidak memiliki hak bebas untuk menentukan pasangan calon Kepala Daerah pilihannya. (Wawancara, Senin 31 Juli 2023)

Selain itu, Penyelenggaraan Pilkada hampir semua dipicu oleh terjadinya konflik diantara warga, terutama diantara warga yang memiliki pilihan Pasangan calon Kepala Daerah yang berbeda. Hal ini pun terjadi akibat fenomena belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Aldo Zalukhu, S.E. (Staf KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Dalam konteks Penyelenggaraan Negara yang demokratis, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Nias Utara sering muncul konflik kekerasan seperti kekerasan simbolik yaitu berita hoaks Setiap pasangan calon Kepala Daerah pasti melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri. Salah satu wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebarakan dimedia sosial sebagai suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial terhadap masyarakat belum tersampaikan dengan jelas karena terjadi kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi penyebaran hoax. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon. Pada akhirnya baik pasangan calon maupun masyarakat tanpa disadari telah mengalami kekerasan simbolik. Pasangan calon ditimpa kekerasan merasa dihianati oleh anggota kepercayaannya, sedangkan masyarakat tanpa menyadari telah mengalami kekerasan didustakan. (Wawancara, Rabu 2 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi pada Tahun 2019, memang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Namun terdapat peristiwa yang sering terjadi pada saat itu seperti kekerasan simbolik dalam bentuk menjelek-jelekan Pasangan calon melalui media sosial/internet, ketidakmatangan rencana yang dilahirkan dari kebijakan umum Pemerintah dalam bentuk aturan dan Psikologi calon dan pendukung yang tidak siap menerima kekalahan dalam pemilihan. Salah satu yang lebih kerap muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan masyarakat juga telah menerima. Sesuai dengan pernyataan Bapak Karyanto Lase Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu money Politik/suap hal ini dikaitkan dengan masyarakat dikarenakan salah satu faktor agar suara masyarakat bisa berada pada pihak pencalon. Dengan melakukan berbagai upaya dan strategi dengan caranya sendiri, demi untuk menang. Salah satu ide politik uang ini dengan mengarahkan anggota kepercayaannya untuk beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima dan tanpa disadari sebenarnya dalam hal itu kekerasan

simbolik sudah terjadi pada diri masyarakat yaitu tanpa sengaja pilihan calon Kepala Daerah yang mereka inginkan tidak bebas menentukan pilihannya masing-masing (Wawancara, Jumat 4 Agustus 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu adanya isu money politik/suap, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah dan adanya mengejantawahkan PNS dan honorer berada dalam posisi dilematis.

Mengapa Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi

Dengan adanya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019, sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dibalik itu telah terjadi beberapa peristiwa seperti adanya kekerasan simbolik dalam penyelenggaraan tersebut. Sehingga penyebab terjadinya hal itu di karena ada beberapa faktor.

Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari informan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019 yaitu adanya faktor ketidaktahuannya/tidak menyadari adanya kekerasan simbolik ini. Hal tersebut sebenarnya terjadi akibat rendahnya atau belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat. Ketika adanya Penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan, masyarakat memang ikut turut berpartisipasi dalam memilih pasangan calon yang diinginkan masing-masing. Akan tetapi terkadang dan cukup lazim terjadi ketika masyarakat menginginkan keuntungan yang semata, dalam memenuhi kebutuhan hidup atau pribadinya, maka tanpa sadar rakyat pun mencari keuntungan dibalik hal tersebut. Seperti ketika pasangan calon Kepala Daerah memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini, memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditujukan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaannya tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon Pemimpin Daerahnya yang mereka inginkan. (Wawancara, Selasa 8 Agustus 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan Simbolik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019 dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya yaitu faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan pribadi khususnya bagi PNS dan honorer. Pada Penyelenggaraan tersebut masyarakat khususnya PNS dan honorer selalu menjadi objek kekuatan politik karena dibawa perintah Kepala Daerah. Sehingga mau tidak mau PNS dan honorer harus mengikuti alur perintah tersebut karena ketika tidak menjalankan perintah Kepala Daerah. Maka, posisi jabatan yang dulunya ditempati oleh PNS dan honorer dapat saja tergeser dari posisinya yang semula, dan demi mendapatkan janji yang diberikan oleh pasangan calon Kepala Daerah serta jabatan yang aman maka tanpa berpikir panjang masyarakat pun khususnya PNS dan honorer harus mengikuti perintah dari Kepala Daerah tersebut. Artinya masyarakat berada pada posisi tertekan, tidak bebas menentukan pilihan calonnya. (Wawancara, Kamis 10 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan simbolik ini dapat terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Karena ada faktor penyebab salah satunya yaitu hoaks yang ada di berita media sosial/internet atau menjelek-jelekan pasangan calon Kepala Daerah di media sosial salah

satu contohnya dalam melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri calon tersebut. Dan salah satu bentuk wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian sembako kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kegiatan tersebut juga tidak luput untuk didokumentasikan untuk disebarluaskan di media sosial. Namun disamping itu, banyak sekali kejanggalan dimana hal tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dari pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial itu belum tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas karena ada permainan atau kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi hoax, tidak lain pelaku kecurangan tersebut tangan kanan dari kepercayaan pasangan calon. Sehingga tanpa mereka sadari kekerasan simbolik sudah berada pada diri mereka, baik itu pecalon maupun masyarakat. (Wawancara, Jumat 11 Agustus 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi yaitu karena Pertama, rendahnya pendidikan politik khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan Pemilihan, Kedua, faktor adanya iming-imingan sejumlah uang dari Pasangan calon Kepala Daerah melalui perantara dari TS (tim sukses) dari Paslon sehingga, masyarakat pun tergiur dan terpengaruh dengan besarnya jumlah nominal uang yang di berikan Paslon demi untuk menang dan memperoleh suara terbanyak dari masyarakat Ketiga, faktor kurangnya sosialisasi dari Penyelenggaraan Pemilu.

Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah terjadinya kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, adapun upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah terjadinya kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 seperti diungkapkan oleh Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara), menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu salah satunya dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pendidikan politik dengan mendatangi langsung masyarakat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang politik ini, seperti apa politik yang baik dan jujur itu artinya dengan adanya pemahaman yang dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya politik ini contohnya saja adanya money politik/suap. Dengan melalui perantara tangan kanan atau anggota kepercayaan pasangan calon beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima. Sehingga dengan adanya pemahaman pendidikan politik maka, masyarakat juga mengerti dan tau bahwa itu akan mengakibatkan dampak bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka Penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan kekerasan simbolik pun teratasi bagi kehidupan masyarakat. (Wawancara, Senin 14 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Adapun upaya KPU Kabupaten Nias Utara yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat. (Wawancara, Rabu 16 Agustus 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah, dan memberikan juga pemahaman kepada masyarakat seperti apa bahayanya ketika bermain dengan politik uang, memanfaatkan atau mengambil

keuntungan yang semata demi memenuhi kebutuhan secara pribadi masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya seminar ini dapat mengatasi kekerasan simbolik dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Wawancara, Jumat 18 Agustus 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu Pertama, dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan politik kepada masyarakat, Kedua, melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, Ketiga, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

Diskusi

Bentuk-Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019

Bentuk Kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada hal tersebut bisa muncul karena ada faktor penyebabnya. Menurut Bourdieu (1994:134), seorang sosiolog Prancis terkemuka abad ke-20, dan muncul dalam karya-karyanya pada awal 1970-an. Istilah kekerasan simbolik adalah menggambarkan jenis kekerasan non fisik yang diwujudkan dalam perbedaan kekuasaan antar kelompok sosial. Dalam arti Kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang tidak terlihat secara langsung, tetapi merugikan individu atau kelompok yang terkena dampaknya.

Adapun bentuk kekerasan simbolik yang ada pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu:

1. Isu politik uang (money politik).

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias utara selalu dikaitkan dengan isu (money politik) salah satunya dengan memberikan iming-imingan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini, memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditujukan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima (Michal, 2020:42).

2. Kabar atau berita hoaks dimedia sosial/internet.

Menurut Herdian (2020:42), pengertian dari hoaks adalah sebuah informasi rekayasa yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi informasi yang sebenarnya. Tak hanya memanipulasi informasi, tetapi memutarbalikan fakta dari informasi asli dengan informasi rekayasa yang meyakinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan berita bohong. Hoaks menjadi sebuah kebebasan berbicara dan berpendapat negatif di internet. Hoaks umumnya bertujuan untuk membuat opini, menggiring opini, membentuk opini, hingga untuk bersenang-senang dengan menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna media sosial.

Dalam pelaksanaan pasangan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara juga terdapat kabar atau berita *hoax* tentang calon Kepala Daerah melalui media sosial. Sehingga hal tersebut, akan berdampak negatif terhadap pasangan calon Kepala Daerah. Setiap pasangan calon Kepala Daerah pasti melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri. Salah satu

wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebar di media sosial sebagai suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial terhadap masyarakat belum tersampaikan dengan jelas karena terjadi kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi penyebaran *hoax*. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon (Fikaron, 2015:132)

Mengapa Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi

Kekerasan simbolik dapat dimaknai sebagai suatu praktik kekerasan yang aksinya mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaannya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi.

Menurut Bourdieu (1997:12), kekerasan simbolik" adalah kekerasan tersembunyi, yang beroperasi terutama di dalam dan melalui bahasa, dan lebih umum lagi di dalam dan melalui representasi, ia mengandaikan ketidaktahuan akan kekerasan yang menimbulkannya dan pengakuan atas prinsip-prinsip yang namanya digunakan, itu memaksakan kesewenangan-wenangan tiga kali lipat (yaitu kekuatan yang dipaksakan, budaya yang ditanamkan, cara pemaksaan), kekerasan terselubung, itu dilakukan tidak hanya dengan bahasa, tetapi dengan gerak tubuh dan hal-hal, tambahan untuk hubungan kekuasaan, itu menambahkannya kekuatan sendiri untuk hubungan kekuasaan.

Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi sebagai berikut:

1. Faktor tidak menyadari adanya kekerasan simbolik.

Adanya faktor ketidaktahuannya/tidak menyadari adanya kekerasan simbolik ini, Hal tersebut sebenarnya terjadi akibat rendahnya atau belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat. Ketika adanya Penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan, masyarakat memang ikut turut berpartisipasi dalam memilih pasangan calon yang diinginkan masing-masing. Akan tetapi terkadang dan cukup lazim terjadi ketika masyarakat menginginkan keuntungan yang semata, dalam memenuhi kebutuhan hidup atau pribadinya, maka tanpa sadar rakyat pun mencari keuntungan dibalik hal tersebut. Seperti ketika pasangan calon Kepala Daerah memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Jadi diposisi inilah sebenarnya terjadi kekerasan simbolik kepada masyarakat tanpa mereka sadari ketika menerima iming-imingan sejumlah uang atau sembako yang diberikan pecalon kepada masyarakat maka disitulah terjadi kekerasan simbolik tanpa mereka sadari (Suharsini, 1993:168).

2. Faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan secara Pribadi.

Faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan pribadi khususnya bagi PNS dan honorer. Pada Penyelenggaraan tersebut masyarakat khususnya PNS dan honorer selalu menjadi objek kekuatan politik karena dibawa perintah Kepala Daerah. Sehingga mau tidak mau PNS dan honorer harus mengikuti alur perintah tersebut karena ketika tidak menjalankan perintah Kepala Daerah. Maka, posisi jabatan yang dulunya ditempati oleh PNS dan honorer dapat saja tergeser dari posisinya yang semula, dan demi mendapatkan janji yang diberikan oleh pasangan calon Kepala Daerah serta jabatan yang aman maka tanpa berpikir panjang masyarakat pun khususnya PNS dan honorer harus mengikuti perintah dari Kepala Daerah tersebut (Moleong, 2018:15).

3. Faktor hoaks yang ada di berita media sosial/internet

Hoaks yang ada di berita media sosial/internet atau menjelek-jelekan pasangan calon Kepala Daerah di media sosial salah satu contohnya dalam melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri calon tersebut. Dan salah satu bentuk wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian sembako kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kegiatan tersebut

juga tidak luput untuk didokumentasikan untuk disebarluaskan dimedia sosial. Namun disamping itu, banyak sekali kejanggalaan dimana hal tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dari pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial itu belum tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas karena ada permainan atau kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi hoaks, tidak lain pelaku kecurangan tersebut tangan kanan dari kepercayaan pasangan calon (Mentalik, 2005:138).

Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat

Pendidikan politik ini berperan untuk masyarakatnya agar lebih mengenal nilai-nilai yang terdapat dalam suatu sistem politik yang baik. Pendidikan politik dapat menanamkan nilai politik yang dilaksanakan bersifat formal ataupun informal, terencana, serta memiliki kesadaran bahkan hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pendidikan politik dengan mendatangi langsung masyarakat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang politik ini, seperti apa politik yang baik dan jujur itu artinya dengan adanya pemahaman yang dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya politik ini contohnya saja adanya money politik/suap. Dengan melalui perantara tangan kanan atau anggota kepercayaan pasangan calon beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima. Sehingga dengan adanya pemahaman pendidikan politik maka, masyarakat juga mengerti dan tau bahwa itu akan mengakibatkan dampak bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka Penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan kekerasan simbolik pun teratasi bagi kehidupan masyarakat (Husauni, 2010:13).

2. Melakukan sosialisasi bagi masyarakat.

Sosialisasi merupakan salah satu bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, proses sosialisasi merupakan cara manusia untuk membentuk kelompok, belajar, dan berhubungan dengan orang lain. Tujuan sosialisasi adalah memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, Mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, Menanamkan nilai dan norma bertingkah laku sesuai peraturan dan kepercayaan masyarakat Untuk memahami peranan dan status sosial masing-masing individu. Adapun upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat (Usman, 2008:124).

3. Mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa.

Seminar adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas dan mencari solusi atas suatu permasalahan yang dipimpin oleh seorang ahli sebagai pembicara. Kegiatan ini merupakan upaya untuk *sharing* pengetahuan/wawasan dari seorang atau beberapa ahli pada peserta yang membutuhkan ilmu pengetahuan/wawasan tersebut. Pelaksanaan seminar tentu harus didasari oleh topik atau tema tertentu. Artinya, tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tanpa persiapan. Mengacu pada hal itu, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tujuan seminar adalah menyampaikan pengetahuan, informasi, atau gagasan dari ahli pada peserta berkaitan dengan topik atau tema yang telah ditentukan. Pengetahuan, informasi, dan gagasan tersebut diharapkan bisa dikembangkan oleh peserta di kehidupan sehari-hari. Adapun upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu dengan mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala

Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah, dan memberikan juga pemahaman kepada masyarakat seperti apa bahayanya ketika bermain dengan politik uang, memanfaatkan atau mengambil keuntungan yang semata demi memenuhi kebutuhan secara pribadi masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya seminar ini dapat mengatasi kekerasan simbolik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Lexy, 2014:54).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka dapat peneliti kemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bentuk-bentuk Kekerasan simbolik yang ada pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu adanya isu money politik/suap, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah. Kedua, Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi yaitu karena faktor rendahnya pendidikan politik khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan Pemilihan, faktor adanya iming-imingan sejumlah uang dari Pasangan calon Kepala Daerah melalui perantara dari TS (tim sukses) dari Paslon sehingga, masyarakat pun tergiur dan terpengaruh dengan besarnya jumlah nominal uang yang di berikan Paslon demi untuk menang dan memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, faktor kurangnya kegiatan sosialisai dari Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Pilkada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah (2012). Kajian Kekerasan Simbolik Terhadap Bidang Politik Lokal pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. KPU Kabupaten Nias Utara: Cv Jejak.
- Aristoteles (2016). Bidang Politik Lokal dan Kekuasaan Politik Kriminalisasi Pilkada. Cirebon: Cv Confident.
- Budiardjo (1982). Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pemerintahan dan Masyarakat Sistem Berkualitas. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bourdieu (2021). Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Feralys (2015). Analisis Kekerasan pada Ranah Politik Lokal, Pemerintahan, dan Kekuasaan Yang Absolut dalam Negara. Riau: Sinar Baru.
- Fitrah (2017). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Cv Pustaka Setia.
- Hoetomo (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: PT. Mitra Pelajar.
- Haryatmoko (2020). Akar Kekerasan Dan Diskriminasi Kekerasan Simbolik Metode Penelitian Penelitian Kualitatif. Lombok: Holistica.
- Ibrahim (2017). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Lokal dan Peraturan Pemerintah. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Marijan (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Penelitian kuantitatif dalam Pembelajaran. Tangerang: Tribun Press.
- Mustofa (2010). Kuasa Wacana Politik dari Kekerasan Simbolik Menuju Kekerasan Fisik dalam Pilkada. Jakarta: Ulya Stain.

- Makein (2011). Kekerasan Simbolik pada Ranah Politik Melalui Media Analisis Kasus dalam Penyelenggaraan Pilkada. Semarang: Jelasutra.
- Martono (2012). Kekerasan Simbolik pada Ranah Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bandung: Rajawali Pers Media.
- Moleong (2013). Ranah Politik Lokal dan Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Megan (2018). Kekerasan Simbolik Penyelenggaraan, Politik, kekuasaan dan Masyarakat Keadilan dalam Hukum Pilkada. KPU Kabupaten Nias Utara: Tribun.
- Melahalin (2019). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. Bandung: Mahi Hikmat.
- Nasution (2015). Penelitian Kualitatif, Pengertian, dan Manfaat Metode Penelitian. Aceh: Holistic.
- Pramessti (2017). Kekerasan dan Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pieter (2021). Kekerasan Simbolik dan Politik Lokal pada Penyelenggaraan Pilkada. KPU Nias Utara: Rajawali Press.
- Robert (2010). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya. KPU Nias Utara: GP Press.
- Reza (2012). Kekerasan Simbolik yang ada dalam Politik Lokal, Pemerintahan dan Penyebab Kekerasan Terjadi di Pemilihan Umum Kepala Daerah. Medan: Kencana.
- Riawanti (2022). Politik Lokal Kekerasan Simbolik dalam Media Mendominasi Secara Halus. Lombok: Anak Indonesia Hebat.
- Surbakti (1992). Peradilan Politik Lokal (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudjana (2005). Penelitian kualitatif dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Simbolik dalam Politik Lokal. Bekasi: Sinar Baru Algensido.
- Santoso (2017). Ranah Politik Penyelenggaraan Pilkada dalam Menunjang Fasilitas Pemilihan Umum. Nias Utara: Rineka Cipta.
- Soerono (2018). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu. KPU Nias Utara: Kencana.
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suda (2019). Kekerasan dalam Pembelajaran Politik Lokal dan Pemerintahan pada Penyelenggaraan Pilkada. Surabaya: Rineka Cipta.
- Sudirman (2021). Politik Lokal Institusi dalam Membentuk Sistem Pemilihan pada Ranah Bidang Penyelenggaraan Pilkada. KPU Nias Utara: Pinhome.
- Saragi (2021). Kekerasan Simbolik Diranah Politik. Kabupaten Nias Utara: Gp Press.
- Teodore (2019). Politik Nasional Konsep Dasar Berpolitik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. KPU Nias Utara: Kemkominfo.
- Abdul Basid Fuadi (2021). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu. Edukatif Jurnal Ilmu Konstitusi, 2 (3), 3212-5718.
- John Dirk Pasalbessy (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. Jurnal Administrasi Pendidikan, 3 (1), 45-62.
- Karina Cahyani (2021). Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik di Kabupaten Nias Utara. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 9 (2), 168-281.
- Nurhasanah, et.al. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada KPU Nias Utara. Jurnal Mimbar, 6 (1), 25-42.
- Pramessti Kartika Agustin. (2017). Kekerasan Simbolik dalam Pilkada. Jurnal Politik dan Ekonomi Sosial, 6 (6), 29-35.
- Suparno (2018). Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Nias Utara Kelebihan dan Kekurangannya. Jurnal Mimbar Administrasi 13 (2), 61-74.
- Ulfah. (2013). Kekerasan Simbolik dalam Wacana Pembelajaran. Jurnal Penelitian Pendidikan Insani, 14 (6), 34-54.